

RINGKASAN

Penerapan *Logical Framework Approach* Sebagai Inovasi Strategis Pada Analisis Manfaat Ekonomi Dan Dampak Ekonomi Sosial Dalam Rangka Pengelolaan Kekayaan Negara. Siti Nur Ameilia Rahmawati, NIM D42220166 tahun 2026, Akuntansi Sektor Publik, Politeknik Negeri Jember, Fitriyati Anisah (Dosen Pembimbing Lapangan) dan Sugeng Hartanto, S.E., M. Akun (Dosen Pembimbing Magang).

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) memiliki peran strategis dalam pengelolaan kekayaan negara melalui fungsi penilaian, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), dan lelang yang terintegrasi. Transformasi kelembagaan DJKN hingga terbentuknya Direktorat Penilaian menunjukkan komitmen pemerintah dalam mewujudkan tata kelola aset negara yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada optimalisasi nilai manfaat ekonomi dan sosial. Direktorat Penilaian, sebagai salah satu unit eselon II di lingkungan DJKN, memegang peran krusial dalam memastikan bahwa kegiatan penilaian aset negara dilakukan secara standar, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan hasil observasi dan analisis terhadap pelaksanaan Analisis Manfaat Ekonomi dan Dampak Ekonomi Sosial (AMDES), masih terdapat berbagai permasalahan konseptual dan metodologis, antara lain overclaiming manfaat ekonomi, pencampuran antara manfaat dan dampak ekonomi, penggunaan asumsi implisit tanpa dokumentasi memadai, serta risiko AMDES hanya menjadi dokumen kepatuhan administratif. Analisis akar permasalahan menggunakan diagram Fishbone menunjukkan bahwa permasalahan tersebut terutama disebabkan oleh lemahnya kerangka logis yang menghubungkan kegiatan penilaian dengan manfaat ekonomi yang dihasilkan.

Penerapan Logical Framework Approach (LFA) terbukti mampu menjadi solusi strategis untuk mengatasi permasalahan tersebut. LFA menyediakan kerangka analisis berbasis kausalitas yang sistematis dengan memetakan hubungan input, output, outcome, dan impact secara jelas. Melalui pendekatan ini, klaim manfaat ekonomi tidak lagi disajikan sebagai angka agregat semata, melainkan sebagai hasil dari proses yang

dapat ditelusuri, diuji secara logis, dan didukung oleh indikator yang relevan serta asumsi yang transparan.

Selain itu, penerapan LFA memiliki keterkaitan yang kuat dengan Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 168/KN/2023, karena secara operasional memperkuat prinsip akuntabilitas, pencegahan overclaiming dan double counting, serta peningkatan kredibilitas AMDES sebagai alat kebijakan. Dengan dukungan monitoring dan evaluasi berbasis LFA, AMDES berpotensi berkembang menjadi instrumen pengambilan keputusan yang lebih efektif dalam pengelolaan dan pemanfaatan BMN.

Dengan demikian, Logical Framework Approach dapat disimpulkan sebagai inovasi strategis yang relevan dan aplikatif dalam meningkatkan kualitas analisis manfaat ekonomi di lingkungan Direktorat Penilaian DJKN. Penerapan LFA secara konsisten diharapkan mampu memperkuat peran AMDES sebagai dasar kebijakan yang defensible, meningkatkan kepercayaan pengambil keputusan, serta mendukung optimalisasi nilai manfaat ekonomi dan sosial dari kekayaan negara secara berkelanjutan.